

1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- a. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11.

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas P3AP2KB TA.2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas P3AP2KB	1. Menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang PPRG 2. Sosialisasi kebijakan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 3. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Kabupaten (%)	65	1.538.412.800	27,54	1.447.984.582			
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah dan Non Pemerintah yang membentuk pokja dan focal point (%)	100	85.106.900	100	65.922.900			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif	50	73.810.300	50	55.926.300,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
			4. Pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dalam politik dan ekonomi		Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	50	11.296.600	50	9.996.600,00			
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi (%)	19,88	1.432.929.100	14	1.365.372.382			
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1.415.124.500	1	1.350.317.782,00			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30	17.804.600	30	15.054.600,00			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa penyedia layanan Pengarusutamaan Gender (PUG) (%)	2,08	20.376.800	2,08	16.689.300			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan	50	20.376.800	50	16.689.300,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
			1. Meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan 2. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan (%)	90	199.191.360	90	169.536.572			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga yang berpartisipasi dalam pencegahan KDRT (%)	26	61.555.100	26	60.331.200			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	61.555.100	1	60.331.200,00			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	80	56.168.660	80	32.405.400			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	5	56.168.660	5	32.405.400,00			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah yang memberikan layanan perlindungan perempuan (%)	100	81.467.600	100	76.799.972			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMAS ALAHAN	UPAYA MENGATA SI PERMASA LAHAN	TINJUT REKOME NDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10	76.669.000	10	72.151.972,00			
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	1	4.798.600	1	4.648.000,00			
			1. Mengembangkan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks kualitas keluarga (%)	54	166.477.500	79,61	121.609.500			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan KG dan Hak Anak (%)	0,53	78.908.700	0,91	39.258.700			
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	64.007.900	1	24.357.900,00			
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	1	14.900.800	1	14.900.800,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN dan Perlindungan Anak	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Predikat layanan Puspaga (kategori)	4	75.130.800	4	70.698.800			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	24.215.500	1	20.083.500,00			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50	50.915.300	38	50.615.300,00			
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak (%)	80	12.438.000	80	11.652.000			
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4	12.438.000	4	11.652.000,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat ketersediaan informasi gender dan anak (%)	97,73	90.279.500	98	76.649.500			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil data gender dan anak (dokumen)	1	90.279.500	1	76.649.500			
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	80.888.300	5	67.258.300,00			
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	1	9.391.200	1	9.391.200,00			
			Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan menuju kecamatan Layak Anak (%)	80	410.620.800	100	401.737.450			
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah dan Dunia Usaha yang mendukung PHA (%)	32,04	40.823.100	48	36.685.950			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	40.823.100	1	36.685.950,00			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas hidup anak (%)	76,33	369.797.700	86	365.051.500			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	240	302.618.200	874	298.267.000,00			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	65.256.300	3	64.861.300,00			
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1.923.200	1	1.923.200,00			
			Upaya perlindungan khusus anak dilakukan dengan: 1. Memberikan layanan yang dibutuhkan anak 2. Melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi 3. Melindungi anak dari pemberitaan identitas di media massa 4. Memfasilitasi pembinaan lembaga yang melayani anak 5. Menjamin keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan satuan pendidikan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (nilai)	68,83	1.150.386.740	68,83	996.658.641			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (%)	71,43	56.550.300	71,43	48.530.300			
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	28	0	28	0			
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	11	56.550.300	11	48.530.300,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
			6. Meningkatkan ketahanan keluarga anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang memiliki standar pelayanan minimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100	199.620.940	100	89.062.754			
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah layanan Tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	5	199.620.940	5	89.062.754,00			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar UPTD (%)	81,82	894.215.500	81,82	859.065.587			
				Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar (Lembaga)	1	819.295.000	1	786.939.788,00			
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan)	1	16.780.500	1	16.215.200,00			
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	46	58.140.000	46	55.910.599,00			
TOTAL							3.555.368.700		3.214.176.245			



Batulicin, 31 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB

Dr. Yuli Susanti, S. H., M.H
NIP. 19840714 201001 2 038

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis dan dievaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024, Pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kesesuaian capaian kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, diukur dengan indikator Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Kabupaten (%)

Dari target target persentase sebesar 65% dengan realisasi 27,54% atau dengan tingkat capaian 42,37%. Data Penyebut/pembagi Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD masih menggunakan Data Tahun 2023 (dikarenakan LRA 2024 belum ada). Indikator ini mengindikasikan formulasi Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD berbanding Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD. Perencanaan berbasis gender di Kabupaten masih kecil. Idealnya ARG Kabupaten sebesar 50% dari belanja operasional dan modal APBD kabupaten. Capaian tahun 2024 termasuk rendah dibanding tahun 2023 yakni 37,71%, hal ini disebabkan belum semua perangkat daerah yang menyusun dan menyerahkan dokumen GAP dan GBS.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah program yang bertujuan untuk mencapai sasaran kebijakan :

- a. Menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang PPRG
- b. Sosialisasi kebijakan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- c. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- d. Pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik dan ekonomi

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota diukur dengan

indikator Persentase terlaksananya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (%) dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi 100% atau dengan tingkat capaian 100%. Semua Perangkat Daerah sudah terbentuk Kelompok Kerja (pokja) focal poin nya. Komponen pencapaian indikator tersebut berkenaan dengan Jumlah Lembaga Pemerintah yang terlibat PUG dibagi seluruh Lembaga yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Tahun 2024 terdapat 47 Lembaga yang aktif terlibat dalam PUG dengan jumlah total lembaga 50. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 50 Perangkat Daerah dan terealisasi 50 atau dengan tingkat capaian 100%
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). Dengan target tahun 2024 sebesar 50 dan terealisasi 50 atau dengan tingkat capaian 100%.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi (%) dengan target tahun 2024 sebesar 19.88% dan terealisasi 14% atau dengan tingkat capaian 70,42%. Komponen pencapaian indikator tersebut berkenaan dengan jumlah perempuan yang bekerja dibagi seluruh perempuan produktif. Tahun 2024 Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 58.484 orang, dengan Jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 107.914 orang. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- 1) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau dengan tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kepada peserta organisasi wanita.
 - 2) Sub kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan indikator Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota. Dari target tahun 2024 sebanyak 30 Organisasi dan terealisasi 30 Organisasi atau dengan tingkat capaian 100%.
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase desa penyedia layanan Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan target 2024 sebesar 2,08% dan realisasi 2,08% atau dengan tingkat capaian 100%. Dengan Sasaran kumulatif 3 Desa yg sudah mendapatkan pelatihan PPRG (1. Desa Setarap 2. Desa Danau indah 3. Desa Sari mulya kec. Mentewe).
- Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
- 1) Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang) dengan target tahun 2024 sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang atau tingkat capaian sebesar 100%.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan

dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN diukur dengan indikator Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan (%), target tahun 2024 sebesar 90% dan terealisasi 90% atau tingkat capaian sebesar 100%. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Presentase lembaga yang berpartisipasi dalam pencegahan KDRT (%), dengan target 2024 sebesar 26% dan realisasi sebesar 26% atau tingkat capaian sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

1) Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan Target 80% Tahun 2024 dan terealisasi 80% atau tingkat capaian sebesar 100%, terlaksananya layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan, baik dari segi fisik maupun psikis. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

1) Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota. Target

Tahun 2024 sebanyak 5 Layanan dan terealisasi 5 Layanan atau tingkat capaian sebesar 100%.

- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah yang memberikan layanan perlindungan perempuan (%), dengan target Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang), dengan target Tahun 2024 sebanyak 10 Sumberdaya dan terealisasi 10 atau tingkat capaian sebesar 100%.
 - 2) Sub kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota dengan target Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**, diukur dengan indikator Indeks Kualitas Keluarga (%). Target Tahun 2024 sebesar 54 dengan realisasi 79,61 atau dengan tingkat capaian 147,43% Indikator ini mengindikasikan formulasi terhadap 5 pilar, meliputi : legalitas, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan KG dan Hak Anak (%). Target tahun 2024 sebesar 0.53 dan realisasi 0.91. didapatkan dari Komulatif jumlah keluarga yg mendapatkan pembinaan kesetaraan gender dan hak anak pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024. (Desa Temuni 99, emil baru 230, setarap 317, danau indah 170 = 816/jumlah seluruh keluarga Kabupaten Tanah Bumbu (88.938). Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia, dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - 2) Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Predikat Layanan Puspaga (Kategori), Predikat Puspaga di Dinas P3AP2KB dalam kategori Madya, Puspaga dapat melayani 4 jenis layanan dari 4 jenis layanan yang ditargetkan. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan, target Tahun 2024 sebanyak 1 Lembaga, dan terealisasi 1 Lembaga.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas belum mencapai dari target 50 sumberdaya, ada 38 orang yang sudah mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

- c. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak (%), dengan target tahun 2024 sebesar 80% dan terealisasi 80%, terlaksananya 4 jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG hak anak yaitu 1. Penerimaan pengaduan 2.Konsultasi 3.Konseling 4.Bimbingan dan informasi masyarakat. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Tahun 2024 sebanyak 4 layanan dan terealisasi 4 layanan.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- 4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK,** diukur dengan indikator tingkat ketersediaan informasi gender dan anak (%), dengan target tahun 2024 sebesar 80% dengan realisasi 100%, Karena sudah terbentuknya KLA kecamatan (12 kecamatan). Program ini mengindikasikan formulasi agregat data gender dan anak yang tersedia, Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan Buku profil data gender dan anak (dokumen) yang memuat capaian kinerja keberhasilan per gender berdasarkan kategori : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Ketenagakerjaan dan Data perempuan dalam pembangunan.
- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah profil data gender

dan anak (dokumen) , dengan target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target Tahun 2024 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota dengan Target Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen berbentuk Buku Profil Terpilah Gender Kabupaten.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), diukur dengan indikator Persentase kecamatan menuju Kecamatan Layak Anak (KLA), target tahun 2024 sebesar 80, realisasi Tahun 2024 Kecamatan yang memenuhi 5 klaster di Kabupaten Tanah Bumbu ada 12 Kecamatan dari yang memenuhi 11 indikator dari 11 indikator katagori KELANA (Kecamatan Layak Anak). Penilaian kecamatan menuju kecamatan Layak Anak dilakukan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase lembaga pemerintah dan non Pemerintah dan Dunia Usaha yang mendukung PHA ('%). Terjadi peningkatan keaktifan 22 lembaga pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam tugas tugas kabupaten, terbentuknya 12 tugas-tugas KLA kecamatan dan terbentuknya forum anak di 53 desa. Target tahun 2024 sebesar 32,04% dan realisasi sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen, dengan kondisi Kegiatan Asosiasi perusahaan sahabat anak indonesia (APSAI) tidak dilaksanakan.
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase lembaga yang mendapat penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas hidup anak (%), Tahun 2024 dengan target 76,33%, terealisasi 86% atau dengan tingkat capaian kinerja 112,66%. Komponen pencapaian indikator tersebut berkenaan dengan jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan berbanding dengan keseluruhan jumlah Lembaga penyedia layanan KHA yang menjadi sasaran. Terdapat 6 lembaga yang mendapat pembinaan 1. Tara/daycare 2. sekolah ramah anak 3. puskesmas ramah anak 4. tempat ibadah (masjid) 5. desa kelurahan layak anak 6. kecamatan layak anak . Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, output sub kegiatan berupa layanan sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, desa ramah anak, Tahun 2024 dengan target 240 anak dan terealisasi 874 anak.

- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target Tahun 2024 3 Dokumen dan terealisasi 3 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (nilai), untuk Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 sebesar 80. Realisasi belum ada dikarenakan masih menunggu penilaian dari Kementerian PPPA. Realisasi Tahun 2023 sebesar 63,52. dengan rincian sebagai berikut : Kluster 1 =15, kluster 2 = 15, kluster 3 = 22,88, kluster 4 = 9.225, kluster 5= 27,61. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (%), target Tahun 2024 sebesar 71,43% dan terealisasi 71,43%. Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan dan tersedianya layanan penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Tahun 2024 dengan target 11 Perangkat Daerah dan terealisasi 11 Perangkat Daerah yang sudah terlaksana Advokasi.

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase lembaga layanan yang memiliki standar pelayanan minimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (%), Tahun 2024 dengan target 100%, realisasi 100% karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sudah memiliki UPTD. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, target Tahun 2024 sebanyak 5 Layanan dan realisasi 5 Layanan (Pengaduan, Konseling kasus, Mediasi, Home visit, Pendampingan korban).
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemenuhan standar UPTD (%), target Tahun 2024 81,82% dan terealisasi 81,82%, Terlaksananya Pelayanan Penanganan terhadap korban yang memerlukan tindak lanjut. Adapun sub kegiatan yang mendukung, yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota dengan Indikator Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar (Lembaga), target tahun 2024 1 lembaga dan terealisasi 1 lembaga.
 - 2) Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota dengan Indikator Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan), target tahun 2024 sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan.
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang), target 46 orang dan terealisasi 46 orang atau capaian 100%.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel III.17.
Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Di Dinas P3AP2KB TA.2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas P3AP2KB	Penyusunan kebijakan terkait Grand Desain Kependudukan. Program ini bertujuan untuk menekan angka kelahiran, mencegah pernikahan dini, dan meningkatkan kesehatan keluarga.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR) usia 15-49 tahun (%)	2,65	1.152.185.700	2,2	954.853.451			
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang dipadukan dan disinkronisasikan (%)	100	87.855.200	100	77.228.394			
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	24.891.200	1	20.976.000,00			
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	12	40.740.000	12	37.620.000,00			
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1	4.799.600	1	3.393.800,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	1	6.807.000	1	6.731.694,00			
				Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen hasil penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur forma, nonformal dan informal	1	4.498.000	1	2.419.000,00			
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	6.119.400	12	6.087.900,00			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan penduduk (dokumen)	1	1.064.330.500	1	877.625.057			
				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	7.842.000	1	7.842.000,00			
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	444.202.900	1	369.122.200,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	1	59.600.000	1	59.600.000,00			
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	149	409.375.100	149	337.811.157,00			
				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	20	68.551.500	20	33.570.000,00			
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12	74.759.000	12	69.679.700,00			
			1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB 2. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan 3. Monitoring faskes, jaringan dan jejaring pelayanan KB 4. Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam meningkatkan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contracepsi Prevalensi Rate (CPR) (%)	80,52	5.575.540.820	70,51	5.446.218.590			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan Prog.KKBPK (%)	19,69	2.050.784.350	19,69	1.957.722.550			
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	194.693.200	12	159.458.000,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
			kepersertaan KB aktif MKJP 5. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	836.386.200	12	815.713.550,00			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4	155.529.600	4	152.289.600,00			
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	599.778.900	1	588.543.400,00			
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	3.093.550	1	3.093.550,00			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	32	261.302.900	32	238.624.450,00			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberdayakan (%)	100	1.079.127.800	100	1.079.022.800			
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional	4	17.500.000	7	17.395.000,00			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	PKB/PLKB yang Tersedia	496	1.033.615.000	515	1.033.615.000,00			
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	543	28.012.800	508	28.012.800,00			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,4	1.490.781.870	6,43	1.461.549.040			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	30.801.200	5	30.746.200,00			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5999	254.471.970	5807	248.270.340,00			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	91	1.008.505.100	158	991.363.400,00			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	55.225.600	3	53.225.500,00			
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	7	141.778.000	7	137.943.600,00			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase ormas yang aktif dalam peningkatan kepesertaan ber KB masyarakat (%)	76,19	954.846.800	76,19	947.924.200			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	387.135.800	12	386.921.200,00			
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	20	3.000.000	20	3.000.000,00			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (kampung)	20	564.711.000	20	558.003.000,00			
			1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 2. Menyediakan Biaya Operasional untuk Tim Pendamping Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	61	2.391.723.800	63,57	2.170.410.909			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang mengikuti Kegiatan di Poktan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi) (%)	34,83	2.391.723.800	70,18	2.170.410.909			
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40	120.900.000	40	120.900.000,00			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Tahun Anggaran 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
						FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN			
			(TPK) dalam kegiatan Pendampingan : 1. Pranikah Calon Pengantin, 2.Ibu Hamil, 3.Ibu Pasca melahirkan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (orang)	250	94.218.000	250	74.241.000,00			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (orang)	726	2.138.505.800	726	1.937.369.909,00			
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	378	38.100.000	378	37.900.000,00			
TOTAL							9.119.450.320		8.571.482.950			



Batulicin, 31 Januari 2025
Kepala Dinas P3AP2KB

Erl Yuli Susanti, S. H., M.H
NIP. 19840714 201001 2 038

a. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis dan dievaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 berdasarkan kesesuaian capaian kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**, diukur dengan indikator Total Fertility Rate (TFR) usia 15-19 tahun (%). TFR dipergunakan untuk melihat keberhasilan Program KB. Tahun 2024 dengan target 2,21 dan terealisasi 2,20 atau dengan tingkat capaian 100,45%. Indikator ini memuat formulasi menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR 15-19 th atau ASFR 35-49 th) dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun). Semakin rendah TFR, maka semakin rendah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Peningkatan angka TFR salah satu penyebabnya adalah bertambahnya PUS (Pasangan Usia Subur) dan meningkatnya pernikahan usia muda yang diiringi dengan peningkatan kelahiran pada pasangan usia muda. Upaya yang akan dilakukan menekan pernikahan pada usia muda, menekan kelahiran pada usia resiko tinggi. Tahun 2023 angka TFR 2.43 menurun menjadi 2.20 di Tahun 2024, hal ini membuktikan semakin berkurang angka kelahiran menurut umur (ASFR 15-19 th atau ASFR 35 -49 th) dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun) semakin bagus. Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk diukur dengan indikator Persentase kebijakan yang dipadukan dan disinkronisasikan (%), beserta Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat

- Kabupaten/Kota, Tahun 2024 target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dokumen GDPK.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan Indikator Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga, Target tahun 2024 sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen berupa laporan bulanan.
 - c) Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal, target tahun 2024 sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan.
 - d) Sub kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan indikator Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) dengan target Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - e) Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dengan Indikator Jumlah dokumen hasil penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, nonformal dan informal, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - f) Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana dengan indikator Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), Tahun 2024 dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator jumlah dokumen pemetaan perkiraan penduduk dengan target 1 dokumen pemetaan sudah terealisasi 1 dokumen di tahun 2023 atau tingkat capaian sebesar 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan dengan indikator Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan dengan target tahun 2023 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, atau capaian 100%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan Indikator Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia, target 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan Indikator Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga, target 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan Indikator Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, target tahun 2024 sebanyak 149 dokumen dan terealisasi 149 dokumen (seluruh desa), atau tingkat capaian 100%. Output sub kegiatan ini berupa dokumen pelaporan dari desa berkenaan dengan data kependudukan. Pada tahun 2024 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyampaikan laporan tersebut.
- 5) Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain DENGAN Indikator Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk, target Tahun 2024 sebanyak 20 dan terealisasi 20.
- 6) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB), diukur dengan indikator Persentase Contracepsi Plevelensi Rate (CPR) (%). Tahun 2024 target mCPR sebesar 80,52% dengan realisasi 73,42% atau dengan tingkat capaian 91,18%. Indikator ini memuat formulasi jumlah akseptor KB berbanding dengan jumlah PUS.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, diukur dengan indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan Prog.KKBPK (%), di Tahun 2024 dengan target 19,69%, terealisasi 19,69% atau dengan tingkat capaian 100%, telah terjalin kerja sama lintas sektor dan mitra kerja. Indikator ini diformulasikan dengan jumlah KK yang menerima materi KIE berbanding jumlah KK.
 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK, target tahun 2024 sebanyak 12 Laporan dan terealisasi 12 laporan.
 - 2) Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), target tahun 2024 sebanyak 12 laporan dan terealisasi 12 laporan.
 - 3) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan indikator Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), target tahun 2024 4 laporan dan terealisasi 4 laporan.
 - 4) Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan indikator Jumlah Dokumen Promosi dan KIE

- Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
- 5) Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
 - 6) Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan indikator Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, tahun 2024 dengan target 32 organisasi dan terealisasi 32 organisasi atau capaian 100%.
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), diukur dengan indikator Presentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberdayakan (%) dengan target 100% terealisasi 100%. Pada tahun 2024 terdapat 38 orang PKB (21 PNS dan 17 PPPK) dan PLKB yang telah diberdayakan. Dengan adanya kebijakan alih Kelola PKB dan PLKB oleh BKKBN Pusat, maka status non ASN tidak dihitung.
- 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan indikator Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit), Target tahun 2024 sebanyak 4 Sarana, terealisasi 7. Didalam DPA 2024 Ada 7 Paket PLKB KIT yang berhasil dibelanjakan.
 - 2) Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang). Target tahun 2024 sebanyak 496 orang dan terealisasi 515 orang, karena ada Pemekaran Desa sehingga di perlukan Penambahan Kader.

- 3) Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dengan indikator Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi), tahun 2024 dengan target sebanyak 543 organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana dan terealisasi terealisasi 508 organisasi atau capaian 93,55%.
- b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%), Tahun 2024 dengan target 8,04% terealisasi 6,43% atau dengan tingkat capaian 125,04%. Indikator ini diformulasikan dengan jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani berbanding dengan jumlah total PUS.

Pada tahun 2024 ada 3.934 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dari total 61.201 Pasangan Usia Subur (PUS).

 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan), Tahun 2024 target sebanyak 5 laporan dan terealisasi 5 laporan.
 - 2) Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang), Tahun 2024 dengan target 5.999 dan terealisasi 5.807 orang tingkat capaian 96,80%.
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan indikator Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan indikator Jumlah Unit Sarana Penunjang

Pelayanan KB (Unit). Tahun 2024 dengan target 91 unit sarana, dan terealisasi 158.

- 4) Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan), Tahun 2024 target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan pembinaan KB di Fasilitas Kesehatan. Laporan berupa Kerja sama dengan faskes, jaringan dan jejaring.
- 5) Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan indikator Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan). Dengan target Tahun 2024 sebanyak 7 Laporan dan terealisasi 7 Laporan dukungan dan kerja sama tenaga lapangan PLKB.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB diukur dengan indikator Presentase ormas yang aktif dalam peningkatan kepesertaan ber KB masyarakat (%), tahun 2024 dengan target 57,14 dan terealisasi 57,14 atau tingkat capaian 100%.

- 1) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen). Target Tahun 2024 sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan). Target Tahun 2024 sebanyak 20 laporan pembinaan, dan terealisasi 20 laporan.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, dengan indikator Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung).

Target Tahun 2024 sebanyak 20 kampung kb dan terealisasi 20 kampung kb.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS), diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Tahun 2024 dengan target 61 realisasi 63,57 atau dengan capaian 103,21%. Data dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, iBangga ditujukan untuk mengukur 3 dimensi yaitu, dimensi Ketentraman, dimensi Kemandirian dan dimensi Kebahagiaan keluarga. Dengan 3 klasifikasi TANGGUH, BERKEMBANG dan RENTAN.

Dalam pencapaian program tersebut, didukung melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, diukur dengan indikator Persentase Keluarga yang mengikuti Kegiatan di Poktan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi) (%). Tahun 2024 dengan target 25,13% terealisasi 25,13% atau dengan tingkat capaian 100%.

Indikator ini diformulasikan dengan jumlah KK yang menjadi anggota kelompok tribina berbanding dengan jumlah KK.

- 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit). Target Tahun 2024 sebanyak 40 unit dan terealisasi 40.
- 2) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang). Tahun 2024 target 250 orang dan terealisasi 250 orang.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan Indikator Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang). Target Tahun 2024 sebanyak 726 orang, dan terealisasi 726 orang atau tingkat capaian 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dengan indikator Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok), dengan target sebanyak 378 poktan dan terealisasi jumlah poktan yang terbentuk dan mendapat pembinaan sebanyak 405 poktan (BKB 150 poktan, BKR 80 poktan, BKL 131 poktan dan UPPKS 44 poktan), atau tingkat capaian 107%.

Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.